

TATA KELOLA KOLABORATIF PROGRAM PENANGGULANGAN KRISIS AIR BERSIH DI DESA PURNAMA

Maharani Dwi Saputri¹, Itok Wicaksono²

^{1,2}) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: maharanionly8@gmail.com

Abstrak

Krisis air bersih yang terjadi berulang setiap musim kemarau di Desa Purnama, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso, mendorong dilaksanakannya program penanggulangan melalui pembangunan sumur bor dan jaringan pipanisasi. Program ini melibatkan pemerintah desa, BPBD, lembaga sosial, dan masyarakat sehingga memerlukan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif serta peran dan kontribusi antaraktor dalam mendukung pengelolaan air bersih yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model Collaborative Governance Regime yang dikemukakan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, dengan fokus pada drivers of collaboration, principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi terbentuk akibat krisis air dan keterbatasan sumber daya desa. Musyawarah dan koordinasi memperkuat principled engagement, kesamaan pemahaman membangun shared motivation, serta pembagian peran, integrasi pendanaan, dan pembentukan lembaga pengelola mendukung capacity for joint action. Secara keseluruhan, tata kelola kolaboratif di Desa Purnama berjalan efektif dan mendukung keberlanjutan pengelolaan air bersih.

Kata kunci: Tata kelola kolaboratif desa; Pengelolaan air bersih berkelanjutan; Collaborative Governance Regime

Abstract

The recurring clean water crisis that occurs every dry season in Purnama Village, Tegal Ampel Subdistrict, Bondowoso Regency, prompted the implementation of a mitigation program through the construction of bore wells and a piped water distribution network. This program involves the village government, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), social institutions, and the community, thus requiring a collaborative governance approach. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance as well as the roles and contributions of various actors in supporting sustainable clean water management. The research employs a descriptive qualitative approach, using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Data analysis refers to the Collaborative Governance Regime model proposed by Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, focusing on drivers of collaboration, principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action. The findings show that collaboration was formed in response to the water crisis and the limited resources of the village government. Deliberation and coordination strengthened principled engagement, shared understanding fostered shared motivation, and clear role division, integrated funding, and the establishment of a management institution supported the capacity for joint action. Overall, collaborative governance in Purnama Village has been effective and supports the sustainability of clean water management.

Keywords: Village collaborative governance; Sustainable clean water management; Collaborative Governance Regime

PENDAHULUAN

Krisis air bersih merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Di tingkat kabupaten, Bondowoso tercatat beberapa kali mengalami kekeringan berkepanjangan. Pada tahun 2024 tercatat 19 desa yang mengalami kekeringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis air ini bukan sekedar persoalan musiman tetapi persoalan struktural yang memerlukan penanganan lintas sektor (SK Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan 2025.Pdf, n.d.). Salah satu desa yang terdampak kekeringan yaitu Desa Purnama di Kecamatan Tegalampel. Sejak 2023 warga mengalami kekeringan berkepanjangan akibat letak

geografis desa yang berada di daerah perbukitan, sehingga sulit mendapatkan aliran air secara gravitasi dari sumber utama. Akibatnya, pemerintah daerah bersama BPBD beberapa kali melakukan distribusi air hingga mencapai 20.000 liter air untuk memenuhi kebutuhan warga (Bahri, 2023). Fenomena ini memperlihatkan bahwa penanganan krisis air bersih memerlukan strategi yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga perencanaan jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak.

Keterbatasan air bersih berdampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat desa purnama hanya mengandalkan hewan ternak dalam mata pencahariannya dikarenakan sulitnya ketersediaan air. Pada musim kemarau, sebagian warga harus berjalan jauh untuk mengambil air ke sumber mata air di desa sebelah atau menunggu distribusi dari truk tangki bantuan pemerintah daerah (Widharsa, 2023). Setiap rumah di Desa Purnama memiliki tempat penampungan air masing – masing. Aktivitas rumah tangga, pertanian, dan pendidikan ikut terganggu karena pasokan air tidak menentu. Ketika pasokan air datang, masyarakat berebut untuk mendapatkan bagian karena jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan seluruh warga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa air bersih bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi faktor sosial ekonomi yang menentukan kualitas hidup masyarakat desa.

Salah satu langkah nyata dalam mengatasi krisis air bersih tersebut, pemerintah Desa Purnama membuat program pipanisasi (Rasyidi, 2023). Program pipanisasi yaitu kegiatan pemasangan pipa yang menyalurkan air dari sumber mata air ke pemukiman warga untuk mengurangi jarak ambil air dan ketergantungan pada distribusi darurat. Program ini penting karena mampu memperluas jangkauan layanan air bersih secara cepat tanpa menunggu proyek besar pemerintah daerah. Di Desa Purnama pelaksanaan program pipanisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, masyarakat, BPBD, dan BMH (Baitul Maal Hidayatullah) menunjukkan respon cepat terhadap masalah krisis air bersih. Namun, keberhasilan program pipanisasi di tingkat desa juga membutuhkan dukungan institusional, pendanaan, dan partisipasi masyarakat agar jaringan terpelihara dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan layanan air bersih. Program pipanisasi ini merupakan bukti nyata adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi persoalan air di tingkat lokal.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyediakan air bersih, ternyata masih terdapat masalah dalam hal distribusi dan pemenuhan kebutuhan teknis di Bondowoso. Di Desa Purnama mengalami kesulitan untuk mengisi timba air berukuran 5 liter yang memerlukan waktu sekitar 30 menit hal ini dikarenakan pipa berdiameter kecil dan aliran air yang sangat kecil (Widharsa, 2023). Selain itu, belum semua wilayah desa terjangkau aliran air karena tekanan air tidak mampu mencapai titik tertinggi.. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan krisis air bersih masih membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan kolaborasi yang lebih luas antar pihak terkait. Selain itu, mekanisme distribusi darurat yang bersifat temporer, seperti pengiriman truk tangki air, tidak menyelesaikan akar masalah jaringan dan infrastruktur. Oleh karena itu, aspek teknis harus diintegrasikan dengan manajemen yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, keterbatasan pendanaan juga menjadi masalah tersendiri. Program pipanisasi sebagian besar dibiayai melalui dana desa dan donasi lembaga sosial, sehingga tidak selalu mencukupi untuk perluasan jaringan. Setelah tahap awal pembangunan selesai tidak ada lagi dukungan dana untuk pemeliharaan jaringan pipa. Pemerintah desa dengan anggaran terbatas tidak mampu menanggung seluruh biaya perawatan. Akibatnya, sebagian pipa rusak jaringan distribusi air tidak lagi berfungsi optimal. Pemerintah daerah memang telah menetapkan kebijakan tanggap darurat kekeringan, namun implementasinya masih berfokus pada distribusi air sementara, bukan penguatan infrastruktur permanen (SK Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan 2025.Pdf, n.d.). Sedangkan, kolaborasi lintas aktor menjadi kunci untuk membangun sistem air bersih yang berkelanjutan.

Permasalahan krisis air tidak hanya teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola yang efektif di tingkat desa. Kolaborasi antara pemerintah desa, BPBD, masyarakat, dan lembaga sosial masih belum terstruktur secara sinergis. Koordinasi dan pembagian peran yang belum jelas menyebabkan lemahnya keberlanjutan pengelolaan air bersih (Rifandini, 2022). Jika kolaborasi ini gagal, maka program air bersih berisiko kembali tergantung pada bantuan sementara. Oleh karena itu, pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi penting sebagai strategi untuk membangun sinergi antaraktor dalam mengelola air bersih secara berkelanjutan.

Di tengah keterbatasan itu, warga masih menunjukkan semangat kerja sama dalam menangani permasalahan air bersih, tetapi semangat tersebut menurun karena tidak ada kepastian dukungan dari pemerintah maupun lembaga sosial. Beberapa warga berinisiatif memperbaiki pipa yang bocor secara mandiri, namun upaya itu tidak cukup untuk memulihkan sistem secara menyeluruh. Situasi ini

menggambarkan lemahnya sistem pengelolaan air yang belum berkelanjutan. Partisipasi masyarakat yang tidak didukung institusi dan dana yang memadai akan sulit mempertahankan kinerja (Zendatro et al., 2024). Akibatnya, kolaborasi hanya aktif pada tahap awal proyek, kemudian berhenti ketika dana bantuan tidak lagi tersedia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan program pipanisasi. Hal ini penting karena program pipanisasi bukan hanya soal pemasangan pipa, melainkan juga soal pembagian tanggung jawab, pendanaan, dan penerimaan sosial di tingkat desa. Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta berperan sebagai mitra yang saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama (Kusumah & Mustofa, 2020). Dengan tata kelola yang baik, program pipanisasi tidak hanya sukses secara teknis tetapi juga dapat berjalan secara kelembagaan. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif merupakan kunci dalam membangun sistem air bersih yang tahan terhadap berbagai perubahan

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai pengelolaan air bersih di Indonesia telah menyoroti pentingnya mekanisme kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas layanan air bersih. Namun, mayoritas studi tersebut berfokus pada wilayah perkotaan dengan basis PDAM atau pada program berskala besar seperti PAMSIMAS, sehingga dinamika tata kelola kolaboratif di wilayah pedesaan masih belum banyak diteliti. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya menilai efektivitas program dari sisi teknis, seperti infrastruktur, akses fisik, dan kapasitas pembiayaan, tanpa menggali secara mendalam proses interaksi antar aktor, koordinasi, relasi kekuasaan, dan mekanisme kolaborasi sosial yang terjadi di tingkat lokal. Lebih jauh, belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengulas bagaimana tata kelola kolaboratif dibangun, dijalankan, dan dipertahankan dalam konteks penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso. Dengan demikian, terdapat celah penelitian berupa kebutuhan untuk mengeksplorasi praktik kolaborasi multi-aktor dalam pengelolaan air bersih di desa, baik dari sisi proses, dinamika, maupun tantangannya, agar dapat menemukan model kolaborasi yang sesuai dengan konteks sosial dan kelembagaan masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul Tata Kelola Kolaboratif Program Penanggulangan Krisis Air Bersih di Desa Purnama, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso dengan metode pendekatan kualitatif dan penyusunan secara induktif. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan krisis air bersih benar-benar berlangsung di tingkat desa, khususnya di Desa Purnama yang menghadapi keterbatasan sumber daya, minimnya infrastruktur, dan kebutuhan koordinasi lintas aktor. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menilai keberhasilan program dari aspek teknis seperti akses dan infrastruktur, tetapi juga mengupas secara mendalam dinamika hubungan antaraktor, proses negosiasi, bentuk partisipasi masyarakat, serta mekanisme kolaborasi yang terbentuk dalam konteks sosial pedesaan. Selain itu, penelitian ini secara spesifik menggunakan Model Collaborative Governance Regime (CGR) untuk memetakan bagaimana kolaborasi dibangun, dipertahankan, dan dijalankan dalam upaya mengatasi krisis air bersih, sehingga memberikan perspektif baru yang belum banyak diangkat dalam studi-studi terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjembatani kekurangan literatur, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah desa, lembaga mitra, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola air bersih yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam program penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, dinamika, serta makna kolaborasi antaraktor dalam konteks sosial yang spesifik. Analisis dilakukan secara induktif, yakni membangun tema dan pola berdasarkan data lapangan yang diperoleh. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap aktor-aktor yang terlibat langsung dalam program, yaitu Kepala Desa dan perangkat desa, BPBD Kabupaten Bondowoso, lembaga sosial BMH, tokoh masyarakat, masyarakat penerima manfaat, serta kelompok pengelola sarana air bersih. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa (profil desa, APBDes, laporan kegiatan), dokumen BPBD, arsip lembaga sosial, serta literatur dan publikasi ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan terhadap kondisi jaringan pipanisasi dan distribusi air, serta dokumentasi untuk memperkuat temuan. Analisis data

menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna memastikan kredibilitas dan konsistensi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, Collaborative Governance Regime (CGR) digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana tata kelola kolaboratif dalam program penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama berlangsung secara empiris. CGR diposisikan bukan sebagai alat evaluasi normatif, melainkan sebagai instrumen analitis untuk memetakan hubungan antaraktor, dinamika interaksi, serta kapasitas tindakan bersama yang terbentuk dalam konteks pengelolaan air bersih di tingkat desa. Melalui pendekatan ini, data lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis dengan menempatkan praktik kolaborasi ke dalam komponen-komponen utama CGR.

Tahap awal penggunaan CGR dalam analisis adalah dengan mengidentifikasi konteks sistemik yang melingkupi pelaksanaan program pipanisasi di Desa Purnama. Konteks ini mencakup kondisi geografis desa, karakteristik sumber daya air, kerangka kebijakan pemerintah daerah, serta situasi sosial ekonomi masyarakat. Data mengenai wilayah perbukitan, keterbatasan debit air, dan kebijakan penanganan kekeringan dianalisis sebagai bagian dari system context yang memengaruhi terbentuknya kolaborasi. Dengan cara ini, CGR memungkinkan penelitian ini memahami bahwa praktik kolaboratif tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan struktural yang membentuk ruang gerak para aktor.

Selanjutnya, CGR digunakan untuk menelusuri faktor pendorong (drivers) yang memicu keterlibatan berbagai aktor dalam program penanggulangan krisis air bersih. Informasi mengenai krisis air berulang, keterbatasan sumber daya desa, serta kebutuhan akan dukungan teknis dan pendanaan dianalisis untuk menjelaskan mengapa pemerintah desa, BPBD, lembaga sosial, dan masyarakat terlibat dalam satu kerangka kerja bersama. Pada tahap ini, CGR membantu memetakan relasi ketergantungan antaraktor dan menjelaskan dasar terbentuknya kerja sama lintas sektor dalam penanganan krisis air.

Komponen utama CGR kemudian digunakan untuk menganalisis dinamika kolaboratif yang terjadi selama pelaksanaan program. Principled engagement dianalisis melalui data mengenai proses musyawarah, komunikasi, dan keterlibatan aktor dalam perencanaan serta pelaksanaan pipanisasi. Shared motivation digunakan untuk membaca bagaimana kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama antaraktor terbentuk dan berkembang selama proses kolaborasi. Sementara itu, capacity for joint action dianalisis dengan menelusuri keberadaan mekanisme kelembagaan, pembagian peran, sumber daya, serta kemampuan teknis yang memungkinkan para aktor bertindak secara kolektif. Ketiga dimensi ini digunakan secara paralel untuk menguraikan bagaimana interaksi antaraktor berlangsung dalam praktik.

Selain itu, CGR juga digunakan untuk menghubungkan dinamika kolaboratif dengan tindakan kolaboratif yang dilakukan di lapangan. Aktivitas seperti pembangunan sumur bor, pemasangan jaringan pipa, serta keterlibatan masyarakat dalam distribusi air dianalisis sebagai bentuk collaborative actions. Dalam kerangka CGR, tindakan-tindakan ini dipahami sebagai hasil dari interaksi antara konteks sistemik, faktor pendorong, dan dinamika kolaboratif, bukan sebagai aktivitas yang berdiri sendiri. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memetakan alur logis antara proses kolaborasi dan praktik pengelolaan air bersih yang dijalankan.

Dengan demikian, penggunaan Collaborative Governance Regime dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasi dan menjelaskan data empiris secara terstruktur. CGR membantu peneliti mengurai kompleksitas tata kelola kolaboratif dengan menempatkan setiap temuan lapangan ke dalam komponen analisis yang saling terhubung. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan bagaimana kolaborasi dibangun, dijalankan, dan dimaknai oleh para aktor dalam konteks penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama, tanpa melakukan penilaian normatif terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan program.

Faktor Pendorong Terbentuknya Kolaborasi (Drivers of Collaboration)

Dalam kerangka Collaborative Governance Regime (CGR), faktor pendorong terbentuknya kolaborasi digunakan untuk menjelaskan kondisi awal yang melatarbelakangi keterlibatan berbagai aktor dalam satu proses kerja bersama. Pada penelitian ini, analisis drivers of collaboration diarahkan

untuk mengidentifikasi alasan empiris yang mendorong pemerintah desa, lembaga pemerintah terkait, lembaga sosial, dan masyarakat Desa Purnama untuk terlibat dalam program penanggulangan krisis air bersih. Dengan pendekatan ini, kolaborasi dipahami sebagai respons terhadap situasi tertentu, bukan sebagai inisiatif yang muncul secara spontan atau terencana sepenuhnya sejak awal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis air bersih yang terjadi secara berulang, terutama pada musim kemarau, menjadi pemicu utama terbentuknya kolaborasi. Keterbatasan akses air bersih telah memengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat, sehingga menciptakan tekanan sosial yang mendorong perlunya tindakan bersama. Kondisi ini membentuk situasi *problem-driven collaboration*, di mana kolaborasi lahir sebagai respons terhadap masalah mendesak yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor secara mandiri. Dalam perspektif CGR, tekanan akibat krisis tersebut berfungsi sebagai *driver* yang mempertemukan kepentingan berbagai pihak dalam satu arena kerja sama.

Selain tekanan krisis, faktor pendorong lainnya adalah adanya ketergantungan sumber daya antaraktor. Pemerintah desa memiliki kewenangan administratif dan legitimasi lokal, namun memiliki keterbatasan dalam pendanaan dan kapasitas teknis. Di sisi lain, BPBD dan lembaga sosial memiliki sumber daya, pengalaman, dan dukungan teknis yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan krisis air bersih, tetapi membutuhkan akses dan penerimaan di tingkat lokal. Kondisi saling membutuhkan ini dianalisis dalam CGR sebagai *resource interdependence* yang mendorong aktor-aktor tersebut untuk membangun kerja sama. Kolaborasi terbentuk karena tidak ada satu pihak pun yang mampu menangani krisis air bersih secara efektif tanpa dukungan pihak lain.

Faktor kepemimpinan juga menjadi bagian penting dalam analisis *drivers of collaboration*. Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah desa berperan sebagai aktor yang memfasilitasi pertemuan antaraktor, membuka ruang koordinasi, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak eksternal. Dalam kerangka CGR, peran ini dipahami sebagai *facilitative leadership* yang berfungsi membuka peluang terjadinya kolaborasi, bukan sebagai kepemimpinan yang bersifat dominatif. Kehadiran aktor yang mampu menginisiasi komunikasi dan mengoordinasikan kepentingan berbagai pihak menjadi salah satu pendorong penting terbentuknya kerja sama dalam penanggulangan krisis air bersih.

Selain itu, dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi faktor yang memperkuat terbentuknya kolaborasi. Air bersih dipahami oleh seluruh aktor sebagai kebutuhan esensial yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Kesamaan pemahaman terhadap urgensi permasalahan ini menciptakan dasar kepentingan bersama yang mendorong aktor-aktor untuk terlibat dalam program pipanisasi. Dalam analisis CGR, kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya dipicu oleh tekanan struktural, tetapi juga oleh kesadaran kolektif terhadap pentingnya penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

Dengan menggunakan kerangka *drivers of collaboration* dalam CGR, penelitian ini mampu mengorganisasi temuan lapangan terkait latar belakang terbentuknya kerja sama antaraktor secara sistematis. Analisis ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam program penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama dipicu oleh kombinasi antara tekanan krisis, ketergantungan sumber daya, peran kepemimpinan fasilitatif, dan kesamaan kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian, faktor pendorong kolaborasi dipahami sebagai fondasi awal yang membentuk arah dan karakter tata kelola kolaboratif yang kemudian berkembang dalam tahapan selanjutnya.

Tabel 1. Faktor Pendorong Terbentuknya Kolaborasi

Komponen Drivers (CGR)	Temuan Lapangan di Desa Purnama	Makna Analitis
Tekanan krisis	Krisis air bersih berulang saat musim kemarau dan mengganggu aktivitas masyarakat	Kolaborasi lahir sebagai respons atas masalah mendesak (<i>problem-driven collaboration</i>)
Ketergantungan sumber daya	Pemerintah desa memiliki legitimasi tetapi terbatas dana/teknis; BPBD/lembaga sosial memiliki sumber daya namun membutuhkan akses lokal	Terjadi <i>resource interdependence</i> yang mendorong kerja sama
Kepemimpinan fasilitatif	Pemerintah desa memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antaraktor	Muncul <i>facilitative leadership</i> sebagai pemicu terbentuknya arena kolaborasi
Kesamaan kepentingan	Air bersih dipahami sebagai kebutuhan dasar bersama	Terbentuk dasar kepentingan kolektif dalam kolaborasi

1. Principled Engagement Dalam Program PIPANISASI Air Bersih

Dalam kerangka Collaborative Governance Regime (CGR), principled engagement digunakan untuk menganalisis bagaimana para aktor yang terlibat dalam program pipanisasi air bersih berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun kesepahaman dalam proses kolaborasi. Pada penelitian ini, analisis principled engagement diarahkan untuk menggambarkan proses pertemuan antaraktor, mekanisme komunikasi, serta pola pengambilan keputusan yang berlangsung selama pelaksanaan program penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama. Dengan pendekatan ini, keterlibatan para aktor dipahami sebagai proses interaksi yang terstruktur oleh kebutuhan bersama, bukan sebagai partisipasi yang bersifat individual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa principled engagement dalam program pipanisasi air bersih berlangsung melalui forum musyawarah dan koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara BPBD, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait rencana pembangunan sumur bor dan jaringan pipanisasi. Proses komunikasi ini menjadi ruang awal bagi para aktor untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta keterbatasan masing-masing pihak. Dalam perspektif CGR, forum-forum tersebut dianalisis sebagai arena discovery dan definition, di mana aktor mulai memahami permasalahan krisis air bersih dan merumuskan tujuan bersama dalam penyediaan akses air.

Selain melalui forum formal, principled engagement juga berlangsung dalam bentuk komunikasi informal selama proses pelaksanaan program di lapangan. Interaksi antara masyarakat dengan pemerintah desa dan pelaksana teknis terjadi secara langsung, terutama dalam kegiatan pembangunan dan pemasangan pipa. Komunikasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi terkait kondisi teknis lapangan, seperti hambatan geografis dan kebutuhan distribusi air di wilayah tertentu. Dalam kerangka CGR, interaksi tersebut dipahami sebagai bagian dari proses deliberation, di mana aktor menyesuaikan rencana dengan realitas lapangan melalui diskusi dan negosiasi praktis.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses principled engagement dalam program pipanisasi lebih terfokus pada tahap perencanaan dan pelaksanaan awal. Pembahasan mengenai pengelolaan pasca pembangunan, seperti mekanisme pemeliharaan jaringan pipa dan pembagian tanggung jawab jangka panjang, belum menjadi bagian utama dalam forum komunikasi yang ada. Dalam analisis CGR, kondisi ini menggambarkan bahwa keterlibatan aktor lebih diarahkan pada penyelesaian masalah jangka pendek, sesuai dengan karakter krisis air bersih yang bersifat mendesak. Dengan demikian, principled engagement dipahami sebagai proses interaksi yang dibentuk oleh kebutuhan situasional, bukan oleh perencanaan kolaboratif jangka panjang.

Melalui penggunaan konsep principled engagement, penelitian ini mampu memetakan bagaimana proses komunikasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan berlangsung dalam program pipanisasi air bersih di Desa Purnama. Analisis ini tidak berfokus pada tingkat keberhasilan atau kegagalan keterlibatan aktor, melainkan pada cara keterlibatan tersebut dijalankan dalam praktik. Dengan demikian, principled engagement berfungsi sebagai lensa analitis untuk memahami pola interaksi antaraktor dalam tata kelola kolaboratif penanggulangan krisis air bersih, serta bagaimana proses tersebut membentuk arah pelaksanaan program pipanisasi di tingkat desa.

Tabel 2. Principled Engagement Dalam Program PIPANISASI

Dimensi Principled Engagement (CGR)	Temuan Lapangan	Makna Analitis
Discovery & Definition	Forum musyawarah membahas krisis air dan rencana pipanisasi	Aktor mulai memahami masalah dan merumuskan tujuan bersama
Deliberation	Diskusi teknis selama pembangunan dan pemasangan pipa	Terjadi penyesuaian rencana berdasarkan kondisi lapangan
Determination	Keputusan pembangunan sumur bor dan jaringan pipa melalui koordinasi desa	Pengambilan keputusan bersifat situasional dan responsif terhadap krisis
Keterbatasan engagement	Pengelolaan pasca pembangunan belum dibahas mendalam	Engagement lebih fokus pada penyelesaian jangka pendek

2. Shared Motivation Dalam Program Pipanisasi Air Bersih

Dalam kerangka Collaborative Governance Regime (CGR), shared motivation digunakan untuk menganalisis kondisi psikologis dan relasional yang terbentuk di antara para aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Analisis ini berfokus pada bagaimana kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama berkembang selama pelaksanaan program pipanisasi air bersih. Pada penelitian ini, shared motivation tidak dipahami sebagai sikap individu semata, melainkan sebagai dinamika kolektif yang terbentuk melalui interaksi berulang antaraktor dalam menghadapi krisis air bersih di Desa Purnama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa shared motivation dalam program pipanisasi air bersih tumbuh dari kesadaran bersama akan urgensi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Krisis air bersih yang terjadi secara berulang membentuk persepsi yang sama di antara pemerintah desa, lembaga terkait, dan masyarakat bahwa penyediaan air bersih merupakan persoalan bersama yang perlu ditangani secara kolektif. Kesamaan persepsi ini menjadi dasar terbentuknya rasa tanggung jawab bersama, yang mendorong aktor-aktor untuk terlibat dalam pelaksanaan program pipanisasi. Dalam kerangka CGR, kondisi ini dianalisis sebagai terbentuknya shared understanding terhadap tujuan kolaborasi.

Selain kesamaan pemahaman, interaksi yang berlangsung selama proses pelaksanaan program juga membentuk tingkat kepercayaan antaraktor. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa, BPBD, lembaga sosial, dan masyarakat selama pembangunan sumur bor dan pemasangan pipa memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara langsung. Melalui interaksi tersebut, aktor-aktor mulai mengenal peran dan kapasitas masing-masing pihak. Dalam perspektif CGR, proses ini dianalisis sebagai pembentukan mutual trust, yaitu kepercayaan yang tumbuh dari pengalaman bekerja bersama dalam situasi krisis, bukan dari kesepakatan formal semata.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa shared motivation dipengaruhi oleh keberlanjutan dukungan yang diterima oleh para aktor. Selama program pipanisasi masih mendapatkan pendampingan dan bantuan dari lembaga eksternal, komitmen untuk terlibat dalam pengelolaan air bersih relatif terjaga. Namun, ketika dukungan tersebut mulai berkurang, dinamika motivasi bersama mengalami perubahan. Dalam analisis CGR, kondisi ini dipahami sebagai dinamika commitment yang sangat terkait dengan kepastian peran dan dukungan sumber daya. Dengan demikian, shared motivation tidak bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti konteks dan pengalaman kolaboratif yang dialami oleh para aktor.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi bersama juga terbentuk melalui pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat langsung program pipanisasi. Akses air bersih yang lebih dekat dan mudah mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan jaringan pipa secara swadaya. Partisipasi ini dianalisis dalam kerangka CGR sebagai bentuk legitimacy terhadap proses kolaborasi yang dijalankan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga sarana air bersih menunjukkan adanya pengakuan terhadap tujuan bersama, meskipun mekanisme formal pengelolaan belum sepenuhnya terbentuk.

Dengan menggunakan konsep shared motivation sebagai alat analisis, penelitian ini mampu menjelaskan bagaimana unsur kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama terbentuk dan berubah selama pelaksanaan program pipanisasi air bersih di Desa Purnama. Analisis ini menempatkan motivasi bersama sebagai hasil dari interaksi kolaboratif yang berlangsung dalam konteks krisis air bersih, bukan sebagai kondisi awal yang sudah mapan. Melalui pendekatan ini, shared motivation dipahami sebagai dinamika penting yang memengaruhi keberlanjutan keterlibatan para aktor dalam tata kelola kolaboratif penyediaan air bersih di tingkat desa.

Tabel 3. Shared Motivation Dalam Program Pipanisasi

Komponen Shared Motivation (CGR)	Temuan Lapangan	Makna Analitis
Shared understanding	Seluruh aktor memahami air bersih sebagai kebutuhan mendesak	Terbentuk kesadaran kolektif terhadap tujuan kolaborasi
Mutual trust	Kepercayaan tumbuh selama pembangunan dan interaksi langsung	Kepercayaan lahir dari pengalaman kerja bersama

Commitment	Komitmen kuat saat ada dukungan eksternal	Motivasi bersifat dinamis dan dipengaruhi dukungan sumber daya
Legitimacy	Masyarakat terlibat menjaga jaringan pipa	Muncul pengakuan terhadap proses kolaborasi

3. Capacity For Joint Action Dalam Program Pipanisasi Air Bersih

Dalam kerangka Collaborative Governance Regime (CGR), capacity for joint action digunakan untuk menganalisis sejauh mana para aktor yang terlibat dalam program pipanisasi air bersih memiliki kemampuan untuk bertindak secara kolektif. Analisis ini tidak berfokus pada hasil akhir program, melainkan pada keberadaan dan fungsi unsur-unsur pendukung tindakan bersama, seperti struktur kelembagaan, sumber daya, pembagian peran, serta kapasitas teknis dan administratif. Pada penelitian ini, capacity for joint action digunakan sebagai lensa untuk menguraikan bagaimana kemampuan kolektif tersebut terbentuk dan dijalankan dalam konteks penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas tindakan bersama dalam program pipanisasi air bersih terbentuk melalui keterlibatan beberapa aktor dengan peran yang berbeda. Pemerintah desa berperan dalam aspek administratif dan koordinatif, BPBD serta lembaga sosial berkontribusi dalam penyediaan sumber daya dan dukungan teknis, sementara masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam analisis CGR, pembagian peran ini dipahami sebagai bagian dari struktur awal tindakan bersama yang memungkinkan program pipanisasi dapat dijalankan. Keberadaan peran yang saling melengkapi menjadi indikator adanya kapasitas kolektif dalam tahap implementasi program.

Selain pembagian peran, kapasitas tindakan bersama juga dianalisis melalui ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang digunakan dalam program pipanisasi sebagian besar berasal dari dukungan eksternal, baik dalam bentuk pendanaan, material, maupun keahlian teknis. Pemerintah desa memanfaatkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan pembangunan sumur bor dan jaringan pipanisasi. Dalam kerangka CGR, kondisi ini dianalisis sebagai bentuk kapasitas tindakan bersama yang bergantung pada kontribusi lintas aktor, sehingga kemampuan kolektif tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, tetapi oleh kombinasi dukungan yang tersedia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek kelembagaan menjadi bagian penting dalam analisis capacity for joint action. Pengelolaan sarana air bersih pasca pembangunan belum sepenuhnya didukung oleh lembaga pengelola yang memiliki kewenangan, aturan kerja, dan sumber daya yang jelas. Dalam perspektif CGR, kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas tindakan bersama masih berfokus pada tahap pelaksanaan fisik program, sementara mekanisme kelembagaan untuk mendukung tindakan kolektif secara berkelanjutan belum sepenuhnya terbentuk. Analisis ini menempatkan kelembagaan sebagai komponen penting dalam memahami bagaimana tindakan bersama dijalankan dalam praktik.

Selain itu, kapasitas teknis dan kemampuan operasional masyarakat juga menjadi bagian dari analisis capacity for joint action. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam kegiatan perbaikan jaringan pipa secara mandiri ketika terjadi kerusakan. Keterlibatan ini menunjukkan adanya kemampuan dasar untuk mendukung keberlangsungan sarana air bersih. Dalam kerangka CGR, partisipasi teknis masyarakat dianalisis sebagai bagian dari kapasitas tindakan bersama yang bersifat praktis, meskipun belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan yang formal.

Dengan menggunakan konsep capacity for joint action, penelitian ini mampu mengorganisasi temuan lapangan terkait kemampuan kolektif para aktor dalam menjalankan program pipanisasi air bersih. Analisis ini menggambarkan bagaimana struktur peran, ketersediaan sumber daya, aspek kelembagaan, dan kapasitas teknis membentuk kemampuan bertindak bersama dalam konteks penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama. Melalui pendekatan ini, capacity for joint action dipahami sebagai proses yang berkembang seiring dengan dinamika kolaboratif, bukan sebagai kondisi yang terbentuk secara otomatis sejak awal kolaborasi dimulai.

Tabel 4. Capacity For Joint Action Dalam Program Pipanisasi

Komponen Capacity for Joint Action (CGR)	Temuan Lapangan	Makna Analitis
Struktur peran	Desa (koordinatif), BPBD/lembaga sosial (teknis & sumber daya), masyarakat	Ada pembagian peran yang saling melengkapi

	(pelaksana lapangan)	
Sumber daya	Dukungan pendanaan, material, dan teknis berasal dari eksternal	Kapasitas kolektif bergantung pada kontribusi lintas aktor
Kelembagaan	Belum ada sistem pengelolaan pasca pembangunan yang kuat	Kapasitas kelembagaan jangka panjang masih terbatas
Kapasitas teknis masyarakat	Masyarakat memperbaiki pipa secara swadaya	Ada kapasitas praktis meski belum terlembagakan formal

5. Analisis Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Collaborative Governance Regime (CGR)

Analisis tata kelola kolaboratif berbasis Collaborative Governance Regime (CGR) dalam penelitian ini diawali dengan penempatan drivers of collaboration sebagai kondisi awal yang membuka ruang terjadinya kolaborasi, bukan sebagai bagian dari dinamika kolaboratif itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi dalam program pipanisasi air bersih di Desa Purnama terbentuk karena adanya tekanan krisis air bersih yang berlangsung secara berulang, keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah desa, serta kebutuhan akan dukungan teknis dan pendanaan dari aktor eksternal. Faktor-faktor ini berfungsi sebagai pemicu struktural yang mendorong para aktor untuk masuk ke dalam satu arena kerja sama, sehingga kolaborasi dipahami sebagai respons terhadap situasi problematik yang tidak dapat diselesaikan secara individual.

Setelah kolaborasi terbentuk, analisis CGR difokuskan pada tiga elemen utama yang menjelaskan bagaimana kolaborasi tersebut dijalankan dalam praktik. Elemen pertama, principled engagement, menggambarkan proses interaksi antaraktor yang berlangsung melalui forum musyawarah, koordinasi, dan komunikasi baik formal maupun informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini menjadi ruang bagi aktor untuk saling memahami permasalahan krisis air bersih, menyepakati langkah-langkah pelaksanaan program pipanisasi, serta menyesuaikan rencana dengan kondisi lapangan. Dalam sintesis ini, principled engagement dipahami sebagai mekanisme yang menghubungkan dorongan awal kolaborasi dengan praktik kerja bersama yang konkret.

Melalui proses principled engagement tersebut, berkembang elemen kedua, yaitu shared motivation. Kesamaan pemahaman mengenai urgensi penyediaan air bersih serta pengalaman bekerja bersama selama pelaksanaan program membentuk kondisi relasional berupa kepercayaan dan komitmen antaraktor. Dalam kerangka CGR, shared motivation dipahami sebagai hasil dari interaksi kolaboratif yang berlangsung secara berulang, bukan sebagai faktor yang hadir sejak awal. Sintesis analisis ini menunjukkan bahwa motivasi bersama menjadi pengikat yang memungkinkan kolaborasi tetap berjalan di tengah keterbatasan yang dihadapi oleh masing-masing aktor.

Elemen ketiga, capacity for joint action, dianalisis sebagai perwujudan dari interaksi dan motivasi bersama ke dalam kemampuan bertindak secara kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas ini tercermin dalam pembagian peran antaraktor, pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan teknis di lapangan. Dalam sintesis CGR, capacity for joint action tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai kemampuan operasional yang memungkinkan kolaborasi dijalankan dalam bentuk tindakan nyata, seperti pembangunan sumur bor dan pemasangan jaringan pipanisasi.

Dengan demikian, sintesis analisis tata kelola kolaboratif berbasis CGR dalam penelitian ini menegaskan adanya perbedaan konseptual antara drivers of collaboration dan tiga elemen utama CGR. Drivers berfungsi sebagai pemicu awal yang mendorong aktor untuk berkolaborasi, sementara principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action menjelaskan dinamika internal kolaborasi setelah kerja sama tersebut terbentuk. Pemisahan analitis ini memungkinkan penelitian untuk menggambarkan tata kelola kolaboratif secara runtut, mulai dari kondisi awal terbentuknya kolaborasi hingga bagaimana kolaborasi tersebut dijalankan dalam konteks penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama.

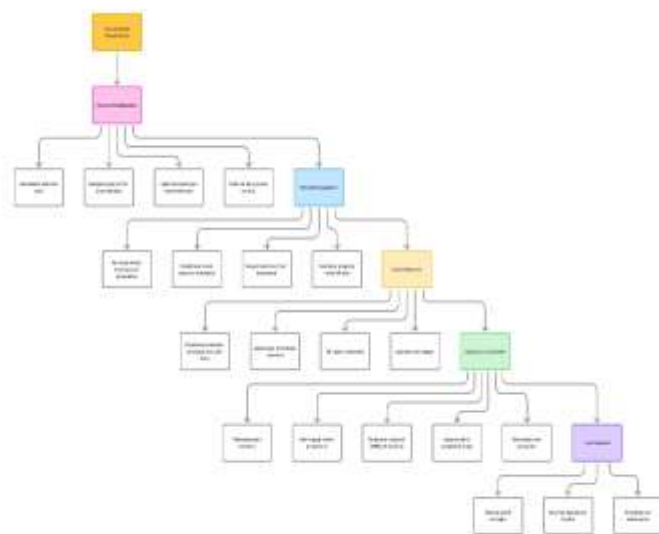
6. Temuan Utama Penelitian

Tabel 6. Matriks Temuan

Komponen Analisis CGR	Temuan Utama	Bukti Empiris di Lapangan	Makna Analisis CGR
-----------------------	--------------	---------------------------	--------------------

Drivers Of Collaboration	Kolaborasi terbentuk sebagai respons terhadap krisis air bersih yang berulang dan keterbatasan kapasitas desa	Kekurangan air bersih terjadi terutama saat musim kemarau; pemerintah desa memerlukan dukungan aktor lain untuk menangani permasalahan	Drivers berfungsi sebagai pemicu awal yang mendorong aktor memasuki arena kolaborasi akibat tekanan masalah bersama
Drivers Of Collaboration	Ketergantungan sumber daya antaraktor menjadi dasar kerja sama	Pemerintah desa menyediakan legitimasi dan koordinasi lokal, sementara BPBD dan lembaga sosial mendukung aspek teknis dan material sumur bor	Ketergantungan sumber daya menjelaskan dasar rasional terbentuknya kolaborasi lintas aktor
Principled Engagement	Interaksi antaraktor berlangsung melalui forum musyawarah dan koordinasi formal	Musyawarah desa membahas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sarana air bersih	Principled engagement berfungsi sebagai ruang komunikasi dan perumusan kesepakatan antaraktor
Principled Engagement	Pembahasan teknis pembangunan dan pengelolaan pasca pembangunan berlangsung secara seimbang	Selain pembahasan pembangunan sumur bor dan pipanisasi, dilakukan penunjukan warga sebagai pengelola melalui SK kepengurusan	Engagement dianalisis sebagai proses yang mencakup perencanaan teknis sekaligus pengaturan pengelolaan berkelanjutan
Shared Motivation	Kesamaan pemahaman mengenai air bersih sebagai kebutuhan dasar membentuk motivasi bersama	Seluruh aktor memandang penyediaan air bersih sebagai kepentingan bersama masyarakat desa	Shared motivation muncul sebagai hasil kesadaran kolektif atas urgensi permasalahan
Shared Motivation	Kepercayaan dan komitmen terbentuk melalui penunjukan pengelola dari unsur masyarakat	Warga yang ditunjuk melalui SK menjalankan peran pengelolaan sarana air	Motivasi bersama dipahami sebagai kondisi relasional yang diperkuat melalui legitimasi peran
Shared Motivation	Partisipasi masyarakat diperkuat oleh kejelasan peran dan mekanisme pengelolaan	Masyarakat bersedia terlibat karena terdapat struktur pengelolaan yang jelas	Shared motivation dianalisis sebagai hasil dari keterpaduan interaksi dan kejelasan kelembagaan

Capacity for Joint Action	Pembagian peran antaraktor memungkinkan tindakan kolektif dijalankan	Pemerintah desa sebagai fasilitator, lembaga pendukung sebagai penyedia bantuan sumur bor, dan pengelola dari masyarakat	Capacity for joint action terbentuk melalui struktur peran yang terorganisasi
Capacity for Joint Action	Pendanaan program bersumber dari kombinasi dana eksternal dan dana desa	Pembangunan sumur bor didukung bantuan luar, sedangkan material pipanisasi dibiayai melalui APBDesa	Kapasitas tindakan bersama dianalisis sebagai hasil integrasi berbagai sumber daya
Capacity for Joint Action	Telah terbentuk lembaga pengelola air bersih dengan aturan formal	Terdapat SK kepengurusan pengelola sarana air bersih di tingkat desa	Kelembagaan formal menjadi bagian dari kapasitas tindakan bersama
Capacity for Joint Action	Mekanisme pendanaan pengelolaan dijalankan melalui iuran rutin masyarakat	Pengelola menerapkan iuran bulanan untuk biaya operasional dan pemeliharaan	Capacity for joint action dipahami sebagai kemampuan kolektif yang didukung oleh mekanisme pembiayaan berkelanjutan
Capacity for Joint Action	Masyarakat memiliki kapasitas teknis dasar dalam pengelolaan sarana air	Pengelola dan warga melakukan perawatan serta perbaikan ringan jaringan pipa	Kapasitas teknis masyarakat dianalisis sebagai bagian dari kemampuan operasional kolektif



Gambar 6. Bagan Matriks Temuan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif dalam program penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama berlangsung melalui keterlibatan berbagai aktor yang memiliki peran dan kontribusi berbeda, namun saling melengkapi. Tata kelola kolaboratif tersebut muncul sebagai respons terhadap krisis air bersih yang terjadi secara berulang dan tidak dapat ditangani oleh pemerintah desa secara mandiri. Kondisi ini mendorong terbentuknya kerja sama antara pemerintah desa, BPBD, lembaga sosial, serta masyarakat dalam satu kerangka kolaborasi untuk menyediakan akses air bersih melalui program pipanisasi.

Analisis berbasis Collaborative Governance Regime (CGR) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif diawali oleh faktor pendorong berupa tekanan krisis dan ketergantungan sumber daya antaraktor. Faktor ini menjadi landasan awal terbentuknya kolaborasi, sebelum kemudian berkembang ke dalam dinamika kolaboratif yang lebih terstruktur. Setelah kolaborasi terbentuk, proses principled engagement berlangsung melalui forum musyawarah dan koordinasi yang membahas secara seimbang aspek perencanaan teknis pembangunan sarana air bersih serta pengelolaan pasca pembangunan. Melalui proses ini, para aktor memiliki ruang untuk berkomunikasi, menyepakati tujuan bersama, dan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi lapangan di Desa Purnama.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa shared motivation terbentuk dari kesamaan pemahaman antaraktor mengenai air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Interaksi yang terjadi selama pelaksanaan program serta penunjukan pengelola dari unsur masyarakat melalui Surat Keputusan (SK) kepengurusan memperkuat kepercayaan dan komitmen bersama. Motivasi kolektif ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana air bersih. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan air bersih di tingkat desa.

Dalam aspek capacity for joint action, penelitian ini menemukan bahwa kemampuan bertindak bersama tercermin dalam pembagian peran yang jelas, dukungan sumber daya yang terintegrasi, serta keberadaan lembaga pengelola air bersih yang formal. Pendanaan program bersumber dari kombinasi bantuan eksternal untuk pembangunan sumur bor, penggunaan dana desa melalui APBDesa untuk material dan jaringan pipanisasi, serta iuran rutin bulanan masyarakat untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Keberadaan mekanisme kelembagaan dan pendanaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih di Desa Purnama dijalankan melalui struktur tindakan kolektif yang melibatkan berbagai aktor secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam program penanggulangan krisis air bersih di Desa Purnama diterapkan melalui proses kolaborasi yang melibatkan pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, dengan peran dan kontribusi yang saling melengkapi dalam mewujudkan pengelolaan air bersih berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan penelitian, penggunaan model CGR memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana proses kolaborasi dibangun, dijalankan, dan dilembagakan dalam konteks desa.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat manfaat pengembangan kajian tata kelola kolaboratif dengan menunjukkan relevansi dan aplikabilitas model CGR dalam konteks penanggulangan krisis air bersih di tingkat desa. Secara praktis, temuan penelitian memberikan gambaran empiris yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa, BPBD, lembaga sosial, dan masyarakat sebagai dasar penguatan koordinasi, pembagian peran, serta pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan rujukan praktis bagi pelaksanaan program air bersih di wilayah lain dengan karakteristik permasalahan serupa.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

Pertama, bagi pemerintah desa, disarankan untuk terus memperkuat peran fasilitatif dalam tata kelola kolaboratif pengelolaan air bersih. Pemerintah desa perlu menjaga keberlanjutan forum koordinasi dan musyawarah yang telah terbentuk, tidak hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga dalam pengelolaan pasca pembangunan. Penguatan fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap lembaga pengelola air bersih yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) kepengurusan menjadi penting agar pembagian peran dan tanggung jawab antaraktor tetap berjalan secara konsisten.

Kedua, bagi lembaga pengelola air bersih yang berasal dari unsur masyarakat, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan teknis dalam mengelola sarana air bersih. Pengelolaan iuran rutin bulanan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Selain itu, pengurus pengelola air bersih dapat mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan sederhana terkait operasional dan pemeliharaan sarana, sehingga keberlanjutan pengelolaan dapat terjamin dalam jangka panjang.

Ketiga, bagi BPBD dan lembaga sosial seperti BMH, disarankan agar dukungan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan bantuan fisik dan teknis, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas lokal. Pendampingan dalam bentuk pelatihan teknis, manajemen pengelolaan sarana air, serta penguatan kelembagaan pengelola dapat menjadi strategi untuk memastikan bahwa kapasitas tindakan bersama di tingkat desa semakin mandiri dan berkelanjutan.

Keempat, bagi masyarakat Desa Purnama, disarankan untuk terus berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana air bersih. Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan dalam bentuk pembayaran iuran, tetapi juga dalam menjaga infrastruktur, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam forum musyawarah desa terkait pengelolaan air. Keterlibatan ini penting untuk memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan sarana air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif.
- Ajayi, V. O. (2023). A review on primary sources of data and secondary sources of data. may. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5378785>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). Analisis pengaruh perbedaan bahasa dalam komunikasi antarmahasiswa. 1.
- Bahri, M. (2023). Kekeringan di Purnama, Polres Bondowoso Bantu 20 Ribu Liter Air Bersih. *TIMES Indonesia*. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/464321/kekeringan-di-purnama-polres-bondowoso-bantu-20-ribu-liter-air-bersih?utm_source=chatgpt.com
- Creswell, J. W. (2014). Qualitative and quantitative approaches. 225–226.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. June 2009, 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Harrison, R. L., Reilly, T. M., & Creswell, J. W. (2020). Methodological Rigor in Mixed Methods : An Application in Management Studies. 1–23. <https://doi.org/10.1177/1558689819900585>
- Kusumah, R. I., & Mustofa, M. U. (2020). Kajian teoritis water governance untuk pengelolaan air di indonesia. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(April). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/259>
- Mardatillah, N. A., & Murhayati, S. (2025). Data dan fakta penelitian kualitatif. 9, 13018–13028.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. XIII(2), 177–181.
- Pandey, P., & Pandey, M. M. (n.d.). *Research methodology* :
- Rasyidi, I. (2023). Krisis air bersih untuk masak ahlulbait indonesia bondowoso bantu air bersih di desa purnama tegalampel. Bondowoso Network.Com. https://bondowoso.jatimnetwork.com/nasional/1829760561/krisis-air-bersih-untuk-masak-ahlulbait-indonesia-bondowoso-bantu-air-bersih-di-desa-purnama-tegalampel?utm_source=chatgpt.com
- Rifandini, R. (2022). Kebijakan inovatif tata kelola air bersih desa melalui dinamika tipologi kelembagaan innovative policy of village clean water governance. 6, 83–94.
- SK Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan 2025.pdf. (n.d.).
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Page 110. 5(September), 110–116.
- Ultavia, A., Jannati, P. J., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). Kualitatif: memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. 11(2), 341–348.
- Widharsa, C. S. (2023). Krisis air bersih melanda desa purnama bondowoso. *Detik.Jatim*.

<https://www.detik.com/jatim/foto/d-7002704/krisis-air-bersih-melanda-des-purnama-bondowoso?page=3>

Zendatro, O., Demanika, Y. D. P., Sinaga, E. P., & Subekti, A. (2024). Pelestarian sistem kelola air bersih yang efektif. *Jurnal Penelitian*, 8(1), 263–272.